

TESIS

PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMERINTAHKAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI



Oleh:

**FEBRIA ANINDIASARI, SH
NIM. 031224153019 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMERINTAHKAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh:

**FEBRIA ANINDIASARI, SH
NIM. 031224153019 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diuji
Pada tanggal 18 Februari 2015

Oleh
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH.
NIP. 196203251986011001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH.
NIP. 196504191990021001

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH., MH.

**Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH.
2. Bambang Suheryadi, SH., M.Hum.
3. Sapta Aprilianto, SH., MH., LL.M.**

Motto :

*“Majulah, tanpa menyingkirkan orang lain,
Naiklah tinggi,tanpa menjatuhkan orang lain “*



*Dedikasi dan cinta untuk ananda Khanza Azqiyatuzzahra
& Khalisha Nur Athayya, Semoga menjadi motivasi
untuk sebuah pencapaian kelak*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah mencerahkan segenap rakhmat, nikmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini dalam frangka memenuhi salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Minat Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tesis ini masih dijumpai berbagai kelemahan dan kekurangan baik kedalaman analisis, teknik penulisan maupun tata bahasa yang digunakan. Namun berkat adanya bimbingan dan pengarahan, terutama dari Dosen Pembimbing maka akhirnya tesis ini dapat disajikan. Untuk itu sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr. Muhammad Zaidun, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Pembantu Dekan, yang telah mendukung kelancaran studi bagi penulis.
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta staf yang telah melayani berbagai kepentingan penulis selama penulis mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Studi Magister Hukum.
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., MH., selaku pembimbing yang di sela kesibukan beliau, dengan penulis kesabaran, senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.

4. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH., MH., sebagai Dosen MKPT I sekaligus selaku Ketua Panitia Penguji Tesis, yang telah memberikan masukan dan pengarahan dengan penuh tanggung jawab.
5. Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan serta dukungan kepada penulis untuk mengikuti program Pendidikan Pascasarjana (Magister).
6. Para Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan positif dalam rangka penyempurnaan tesis.
7. Dr. Adriano, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Bandung beserta staf, dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Bandung beserta staf, yang telah banyak membantu penulis dalam upaya pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan tesis ini.
8. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana.
9. Agus Susanto, suami dan belahan jiwa yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan dorongan semangat, serta kasih sayangnya terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Ayahanda Sudirman Budiharjo, S.Ag., sebagai teman diskusi yang dengan penuh kesabaran senantiasa membantu penulis untuk menemukan ide-ide dalam penulisan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung telah membantu penulis dalam usaha penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan yang telah beliau-beliau berikan kepada penulis, menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala. Selanjutnya penulis juga berharap, tesis ini dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya serta bermanfaat dalam khasanah pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

Surabaya, Pebruari, 2015

Penulis,

Febria Anindiasari, SH

A B S T R A C T

Within the existing legal systems in Indonesia, corporation is an artificial legal entity , which may be imposed by a criminal liability. As a legal entity, a corporation is not only given an authority to act as if it is a person, but may also be given huge freedom to run an economic activity. This research was done through method and normative approach, by studying the laws on corporate criminal liability in Indonesia. The purpose of this research is to analyzing Judge authority in decided so that Public Prosecutor demanded the other criminal subject that involve on corporate criminal liability cases, and to analyzing law consequence about Public Prosecutor which did not court order.

In the research, it was found that Judge authority decide so that Public Prosecutor demanded toward the other corruption criminal subject that involve according to Indonesian positive laws related to the eradication of corruption offences, which relevant with corporate criminal liability. Therefore, all cases using criminal proceedings, were based on individual liability, mostly the directors or shareholders or persons who holding important roles in the operation of these corporate.

Thus, the constructions of investigations and prosecutions of these cases, were based on individual acts, and not focused on the criminal corporate liability itself. For that reason, it is realy need more continue demanded to all side involde of the cases would have occured in those countries, not only the directors or other corporation's officials who may be punished, but also the corporation itself, would be imposed a corporate criminal liability, criminal acts that had been conducted can be elaborated with focus on legal acts conducted by corporations. may be constructed more accurately, offences that resulting in state financial losts. The law consequence of Public Prosecutor that do not implementation court order, it is can be barrier for case solution and law of justice effort to punishment all side which involves resulting in state financial losts. Seen from the elimination of corruption crime law consequence of Public Prosecutor that do not implementation court order, it is means be in contradiction with section 1 point 1 UU No. 16/2004 about Kejaksaan Republik Indonesia, or section 1 point 6a KUHAP that Public Prosecutor is a functional official which given the authority to act as prosecutor and executor of fixed court decision.

Keywords: *Judge Authority, Prosecution, Corporate criminal liability.*